



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**PERUBAHAN RENCANA  
KERJA TAHUN 2024**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI**

# KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAH, segala puji hanya bagi ALLAH SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2024 dapat disusun dengan baik dan selesai tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024.

Dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dan digunakan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mendukung pencapaian Misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2024-2026 khususnya Misi Pertama "*Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri*", Misi Kedua "*Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu*", dan Misi Keempat "*Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik*".

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen Renja ini, terutama kepada seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh tahapan penyusunan dokumen ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Dumai , 2024  
Kepala

ZULFAHREN, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP.197601172002121003

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI ii**

**DAFTAR TABEL iii**

**DAFTAR GAMBAR iv**

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN  
TRIWULAN II 2024**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun TRIWULAN II  
2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

**BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**BAB I**  
**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

## **BAB I**

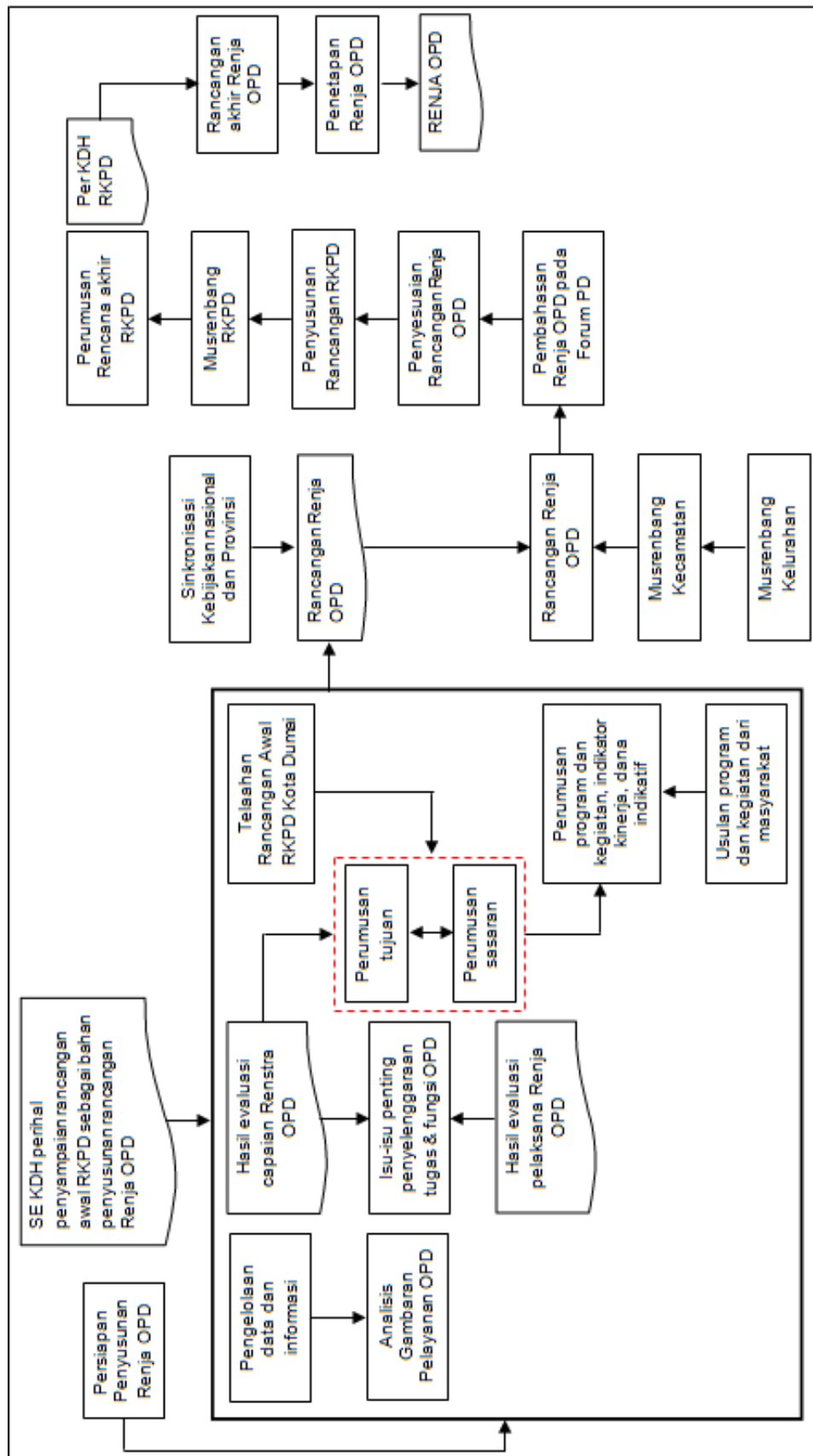
### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Perubahan Perubahan Rencana Kerja Merupakan Perubahan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan II.

Ada pun proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
3. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah  
 Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum perumusan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Bab I - Pendahuluan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun TRIWULAN II 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun TRIWULAN II 2024-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun TRIWULAN II 2024 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);



Bab I - Pendahuluan

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 968);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun TRIWULAN II 2024 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun TRIWULAN II 2024 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun TRIWULAN II 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Dumai (Lembar daerah Kota Dumai tahun 2016 nomor 1 seri D), sebagaimana telah dirubah dengan peraturan pemerintahan daerah Kota Dumai nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota dumai (Lembar Daerah Kota Dumai tahun 2018 nomor 1 Seri D)
25. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
26. Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 9 Seri D); dan

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan dokumen perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk dasar perubahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2024, meliputi:

## BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra sampai dengan  
TRIWULAN II 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## BAB III PERUBAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH





**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**BAB II**

***HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN  
TRIWULAN II***

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **21. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan suatu upaya pemantauan/supervisi yang dilakukan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi suatu program/kegiatan dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah program/kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan pada saat evaluasi, selanjutnya akan ditentukan alternative solusi yang harus dilakukan agar target-target yang telah ditetapkan pada setiap program/kegiatan dapat tercapai pada akhir tahun rencana.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra. Pada Tabel 2.1 terlampir rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun TRIWULAN II 2024, mengacu pada APBD, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.1

**Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024**  
**Triwulan II**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI**

No	Sasaran RKPD	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Berjalan Tahun 2024 yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	SKPD Penanggung Jawab	Hambatan Kendala	Tindak Lanjut	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1	2	3	4	7		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100%	16		17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>															
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				<b>8.080.450.336,00</b>		<b>3.280.558.986</b>		<b>41</b>							
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		<b>7.749.689.336,00</b>		<b>3.079.116.186</b>		<b>40</b>							
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		36.288.674,00		18.212.501		50							
		Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2,00 Dokumen	27.896.900,00	1	10.812.500	50	39						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1,00 Dokumen	3.394.800,00	1	2.500.000	100	74						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00 Dokumen	2.517.774,00	1	2.450.000	100	97						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1,00 Dokumen	2.479.200,00	1/2	2.450.000	50	99						
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>4.546.543.920,00</b>		<b>1.804.186.160</b>		<b>40</b>							
		Perediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (12 Bulan)	12,00 Bulan	4.532.655.120,00	0	1.795.253.160	50	40						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan semesteran (Dokumen)	1,00 Dokumen	3.936.300,00	0	3.883.000	50	99						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan semesteran (Dokumen)	1,00 Dokumen	9.952.500,00	0	5.050.000	50	51						
		<b>Administrasi Barang Perangkat Daerah</b>		<b>15.300.000,00</b>		<b>3.825.000</b>		<b>25</b>							
		Penyediaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jenis aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	3,00 Unit	15.300.000,00	0	3.825.000	50	25						
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>1.895.554.496,00</b>		<b>684.233.485</b>		<b>36</b>							
		Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik (bulan)	12,00 Bulan	32.283.000,00	0	-	0	-						
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor (12 Bulan)	12,00 Bulan	1.250.165.496,00	0	491.637.000	40	39						
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (12 Bulan)	12,00 Bulan	54.637.500,00	0	17.860.000	50	33						
		Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (Bulan)	12,00 Bulan	41.137.200,00	0	19.058.000	50	46						
		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12,00 Bulan	58.593.300,00	0	17.200.000	50	29						
		Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Kebutuhan bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan (12 Bulan)	12,00 Bulan	15.600.000,00	0	4.200.000	50	27						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah (12 Bulan)	12,00 Bulan	412.163.000,00	0	134.278.485	50	33						
		Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Jumlah aplikasi terseleenggara (1 Aplikasi)	1,00 Aplikasi	30.975.000,00	0	-	0	-						
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>246.402.206,00</b>		<b>216.400.000</b>		<b>88</b>							
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin	12,00 Bulan	246.402.206,00	1	216.400.000	0	88						

	Penyediaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan			828.564.040,00		285.729.040		34										
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	12.00 Bulan	129.999.400,00	-	-	0	-										
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	12.00 Bulan	698.564.640,00	0	285.729.040	60	41										
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>			<b>181.036.000,00</b>		<b>66.530.000</b>		<b>37</b>										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	6.00 Jenis	110.036.000,00	0	41.760.000	50	38										
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (bulan)	12.00 Bulan	71.000.000,00	0	24.770.000	50	35										
	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>			<b>124.991.000,00</b>		<b>54.902.800</b>		<b>44</b>										
	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>			<b>124.991.000,00</b>		<b>54.902.800</b>		<b>44</b>										
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2.00 Laporan	124.991.000,00	0	54.902.800	50	44										
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>			<b>99.360.000,00</b>		<b>74.580.000</b>		<b>75</b>										
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>			<b>99.360.000,00</b>		<b>74.580.000</b>		<b>75</b>										
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Laporan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2.00 Laporan	99.360.000,00	0	74.580.000	50	75										
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>			<b>106.410.000,00</b>		<b>29.710.000</b>		<b>28</b>										
	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>			<b>44.460.000,00</b>		<b>29.710.000</b>		<b>67</b>										
	Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2.00 Laporan	44.460.000,00	0	29.710.000	50	67										
	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>			<b>61.950.000,00</b>		<b>42.250.000</b>		<b>68</b>										
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan	Jumlah Laporan Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan	2.00 Laporan	61.950.000,00	0	42.250.000	40	68										
	<b>PROGRAM PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>			-		-		<b>0</b>										
	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>			-		-		<b>0</b>										
	Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Profil dan Proyeksi kependudukan tersusun	2.00 Laporan	-	-	-	0	0										
								47%										
								40%										
								Sangat Rendah										
								Sangat Rendah										
				8.080.450.338	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	3.238.308.986		47%	40%									
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			Sangat Rendah	Sangat Rendah									



-

Pada Tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja program dan kegiatan dapat diukur sampai dengan tahun TRIWULAN II 2024. Realisasi program/kegiatan mencapai kinerja yang hampir memenuhi target , dengan realisasi keseluruhan 47% dan Keuangan 40 %

-



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**BAB III**

***PERUBAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN  
PENDANAAN***

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

### BAB III

## PERUBAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Hasil Evaluasi terdapat beberapa Sub Kegiatan yang memerlukan Penambahan Dana untuk Pelaksanaan Kegiatan karena disebabkan adanya beberapa perubahan peraturan antara lain kenaikan Gaji dan Tunjangan PNS , serta ada beberapa kegiatan yang memerlukan tambahan dana untuk mencapai target nasional dan dan target daerah .

Ini tergambar pada tabel 3.1

REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPJ TAHUN 2024  
PROVINSI RIAU KOTA DUMAI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI

No.	RANCANGAN PERUBAHAN RKPJ					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				8.080.450.336	8.910.113.246	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				10.810.356.040	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.080.450.336	8.910.113.246	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.810.356.040	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			8080450336	8.080.450.336	8.910.113.246	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				10.810.356.040	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyusunan penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	7.749.689.336	8.431.302.246	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyusunan penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	9.456.356.040	Pagu tidak Melebihi Rastera dan RPJMD
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	7 Dokumen	36.288.674	60.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	7 Dokumen	118.000.000	penambahan untuk koordinasi penyusunan laporan kinerja karena penilaian kinerja dari pusat.
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan	4.546.543.920	5.000.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan	5.000.000.000	Sesuai
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	15.300.000	15.300.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	25.000.000	Sesuai
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PNS yang melaksanakan kerja administrasi kepegawaian	31 Orang	-	50.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PNS yang melaksanakan kerja administrasi kepegawaian	31 Orang	20.000.000	Sesuai
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.895.554.496	2.050.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.530.000.000	Penyediaan Bahan Pengalangan Pabean, Tinta, Barok, kertas dan lain lain
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45 Unit	246.402.206	246.402.206	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45 Unit	724.792.000	Untuk medukung pemetaan dan pembaruan perlatan pada jabatan ADMINISTRUK DAN CAPIL
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	12 Bulan	828.564.040	828.564.040	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	12 Bulan	828.564.040	Sesuai
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jenis barang milik perangkat daerah yang dipelihara	3 Unit	181.035.000	181.035.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jenis barang milik perangkat daerah yang dipelihara	3 Unit	210.000.000	Adanya tambahan untuk pemeliharaan Mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) dan 2 Sisir
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Calakan penduduk yang terdaftar administrasi kependudukan	88%	124.991.000	174.991.000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Calakan penduduk yang terdaftar administrasi kependudukan	88%	797.000.000	Pagu tidak Melebihi Rastera dan RPJMD
2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jenis layanan pendaftaran penduduk	20 jenis	124.991.000	174.991.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jenis layanan pendaftaran penduduk	20 jenis	510.000.000	Kebutuhan akan biaya Pendaftaran Penduduk sebagai pertukaran lembaran anggaran menjadi BUKITRA
							Penyenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyelenggaraan jenis layanan pendaftaran penduduk secara daring	7 jenis	287.000.000	Keperluan akan pelayanan keling Jemput Bola, serta sosialisasi akan pentingnya dokumen kependudukan
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Calakan penduduk yang terdaftar administrasi kependudukan	88%	99.360.000	99.360.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Calakan penduduk yang terdaftar administrasi kependudukan	88%	337.000.000	Pagu tidak Melebihi Rastera dan RPJMD
3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jenis layanan pencatatan sipil	23 Jenis	99.360.000	99.360.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jenis layanan pencatatan sipil	23 Jenis	100.000.000	Sesuai
							Penyenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyelenggaraan jenis layanan pencatatan sipil secara daring	4 jenis	237.000.000	Keperluan akan pelayanan keling Jemput Bola, serta sosialisasi akan pentingnya dokumen kependudukan
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Calakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	94%	106.410.000	106.410.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Calakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	94%	170.000.000	Pagu tidak Melebihi Rastera dan RPJMD
4.1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemantauan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	15 OPD	44.460.000	44.460.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemantauan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	15 OPD	70.000.000	Perlu Anggaran untuk meeting dan Evaluasi Pemantauan Data
4.2	Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi yang mendapatkan perjanjian kerjasama	42 Lembaga	61.950.000	110.000.000	Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi yang mendapatkan perjanjian kerjasama	42 Lembaga	100.000.000	Sipertukan dana untuk kebutuhan pengelolaan Database elektronik Database terpusat sehingga daerah harus melakukan Koordinasi dan Konsultasi
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyusunan data perkembangan kependudukan yang terbaru	100%	-	50.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyusunan data perkembangan kependudukan yang terbaru	100%	50.000.000	Pagu tidak Melebihi Rastera dan RPJMD
5.1	Penyusunan Profil Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyek kependudukan	1 Dokumen	-	50.000.000	Penyusunan Profil Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyek kependudukan	1 Dokumen	50.000.000	Sesuai
					8.080.450.336	8.080.450.336					10.810.356.040	



